



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Membangun Rakyat dan Budaya Bernegara Yang Mulia dan Bermartabat Berbasis Pancasila

Disampaikan pada diskusi Pemuda Politisi Anggota Parlemen se-Indonesia,
Jakarta 3-4 November 2010

Enam puluh lima tahun lebih kita lalui sebagai bangsa merdeka. Dalam kurun waktu itu, bangsa Indonesia telah berhasil dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan mengisinya dengan pembangunan, berhasil meningkatkan taraf kehidupan rakyat, dan menempatkan bangsa Indonesia pada kedudukan yang terhormat dan bermartabat dalam pergaulan antar bangsa. Namun dengan keberhasilan itu, kita masih berhadapan dengan berbagai permasalahan yang harus kita pecahkan dalam rangka membangun masyarakat (membangun rakyat) sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari masyarakat global, kita dituntut juga untuk mengejar target isu-isu global yang tertuang dalam Tujuan

Pembangunan Abad Milenium atau sering juga disebut Program Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) yang merupakan program yang dicanangkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam *Millenium Summit* yang diselenggarakan pada bulan September 2000.

MDGs berisi 8 tujuan yang harus dicapai oleh 191 negara anggota PBB pada tahun 2015. Masing-masing tujuan tersebut mempunyai beberapa target yang akan dicapai mulai dari target Nasional, propinsi, kabupaten/kota disesuaikan dengan kondisi dan prioritas pembangunan daerah. Kedelapan tujuan tersebut adalah: (1) menghapuskan kemiskinan dan kelaparan; (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang; (3) meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan; (4) mengurangi tingkat kematian anak; (5) memperbaiki kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit menular lainnya; (7) menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan (8) membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Dengan latar belakang demikian, saya pikir Tema **“Membangun Rakyat dan Budaya Bernegara yang Mulia dan Bermartabat berbasis Pancasila”** yang digagas oleh Kaum Muda dalam suasana peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini sangatlah tepat. Tema ini haruslah menggetarkan jiwa dan raga kita, karena akan mengajak kita merefleksikan pemikiran, gagasan dan karya-karya besar para pemimpin pendahulu republik

ini dalam pergulatannya memecahkan problem-problem kebangsaan dan kenegaraan yang berbhinneka tunggal ika.

Ini adalah tanggung jawab kita golongan terpelajar, untuk bekerja keras menguatkan kembali pondasi-pondasi kebangsaan kita dan menemukan langkah- langkah taktis dan startegis untuk menjemput masa depan bangsa yang lebih bermartabat.

Langkah-langkah yang akan kita ambil untuk menghadapi masa depan harus tetap mengacu pada konstistusi dan amanat rakyat, dan memastikan bahwa pembangunan yang kita laksanakan adalah bagi kepentingan rakyat membangun masyarakat.

Pembangunan yang berorientasi masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat akan bermakna apabila **hakikat pembangunan yang dibangun adalah dari rakyat dan untuk rakyat, artinya sumber utama pembangunan adalah rakyat itu sendiri.** Semakin tumbuh dan berkembang atas adanya rakyat sendiri, makin kukuh kemandirian kita sebagai bangsa. Kemandirian yang kita bangun adalah dengan optimisme dan keterbukaan pergaulan dengan bangsa lain, bukan dalam keterisolasian yang menyebabkan kemandekan.

Dalam proses membangun masyarakat yang maju dan mandiri, tentu akan mengalami tranformasi. Proses tranformasi, apabila dihadapkan pada kondisi perkembangan nasional akhir-akhir ini, baik di bidang politik, hukum, ekonomi, pertahanan dan

keamanan, serta sosial budaya terdapat ketidakpuasan sosial dikalangan masyarakat, hal ini menjadi persoalan baru yang semakin rumit ketika dihadapkan pada situasi iklim keterbukaan, demokrasi, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat; melalui internet, Twitter, BBM, dan bahkan SMS.

Ekspresi ketidakpuasan bisa dengan mudah disebarkan dan menyebar luas ke tengah-tengah masyarakat serta ke segala penjuru dengan sangat cepat dalam hitungan detik.

Dalam konstruksi ketatanegaraan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen, sekarang ini tidak lagi dikenal adanya supremasi salah satu lembaga negara di atas lembaga negara lainnya, juga tidak lagi ada mandataris satu-satunya di negeri ini, atau dengan kata lain, tidak ada penanggung jawab tunggal atas kekurangan-kekurangan yang masih terjadi dan ditemui dalam kehidupan pembangunan nasional kita. Semua lembaga negara masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan serta sekaligus porsi tanggung jawabnya sendiri, meskipun saling berhubungan secara sinergis dalam konstruksi mekanisme checks and balances.

Muara dari kenyataan adanya ketidakpuasan yang dihadapkan pada situasi keterbukaan tersebut adalah mulai terasanya gejala pesimisme, apatisme, dan sinisme terutama di kalangan rakyat luas, yang kemudian dikonfirmasi oleh kalangan cendekiawan dan elite politik nasional yang memang lebih

artikulator. Kecenderungan meluasnya kekecewaan ini tentu tidak boleh diabaikan, apalagi diremehkan, melainkan harus menjadi perhatian kita bersama, termasuk kaum muda.

Disamping kecenderungan diatas, dalam memasuki zaman kehidupan yang makin mengglobal, dan mencermati, mendalami serta menangkap berbagai pandangan, ungkapan dari masyarakat, terutama dari kalangan cendekiawan dan pemuka masyarakat, memang ada hal-hal yang menjadi keprihatinan.

Pertama, pasca orde baru (masa reformasi saat ini) kita merasakan semangat kebangsaan telah mendangkal atau terjadi erosi terutama di kalangan generasi muda; seringkali disebut bahwa sifat hedonisme atau sifat materialistis, telah menggantikan idealisme yang merupakan sukmanya kebangsaan.

Kedua, adanya kekhawatiran ancaman desintegrasi bangsa (pasca Timor-Timur) dan pengaruh yang cukup mencekam adalah kejadian di Yugoslavia bekas Uni Sovyet, Sri Lanka dan juga dinegara lainnya, seperti di Afrika yang paham kebangsaannya merosot menjadi paham kesukuan dan keagamaan.

Ketiga, keprihatinan adanya upaya untuk melarutkan pandangan hidup ke dalam pola pikir yang asing untuk bangsa ini.

Mengenai kekhawatiran pertama, lebih mencerminkan perkembangan gaya hidup. Cara berpakaian, lagu-lagu, makanan, bahasa bahkan sikap keseharian mencerminkan gaya hidup internasional, terutama di perkotaan. Peningkatan taraf hidup dan

globalisasi dan arus informasi menyebabkan terjadi hal demikian. Ujiannya nanti adalah seberapa jauh kita, terutama generasi muda, merasa terpanggil dan berreaksi ketika bangsa dan negara berada dalam ancaman. Namun yang bisa menjadi ujian sekarang ini adalah seberapa jauh kita dapat mengembangkan semangat menghargai dan mendahulukan karya anak bangsa sendiri sebagai ungkapan nasionalisme atau patriotisme baru.

Kekhawatiran yang kedua, yang juga, mendapat perhatian adalah terutama mengenai adanya gejala mempertentangkan berbagai perbedaan yang ada pada bangsa kita. Bangsa kita sangat majemuk, sangat bhinneka. Karena itu ada sumpah pemuda. Karena itu ada semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Sejarah telah menunjukkan betapa kemajemukan itu dapat mendorong divergensi yang suasa payah telah di atasi sehingga bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang utuh. Upaya ini dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, yaitu dengan diterimanya perubahan Piagam Jakarta, menjadi apa yang dikenal dalam UUD Negara Republik Indonesai Tahun 1945 sekarang.

Kekhawatiran ketiga, tidak terlepas dari dua hal dimuka, kesadaran masyarakat yang kian meningkat, sebagai hasil pembangunan menyebabkan tumbuhnya sikap kritis. Keterbukaan yang dihasilkan oleh pembangunan politik membuat segala pandangan dapat dikemukakan secara bebas. Dengan sendirinya terjadi interaksi yang makin leluasa dan kerap dengan pandangan-pandangan dari luar.

Kecenderungan dalam menyikapi perkembangan nasional dalam membangun masyarakat akhir-akhir ini terdapat kerancuan pemahaman atas konstruksi ketatanegaraan kita menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Sistem kita adalah *presidensial* di mana presiden adalah sekaligus kepala pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat, dan bersifat *fix term* untuk lima tahun.

Dalam konstruksi ketatanegaraan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen sekarang ini tidak lagi dikenal adanya supremasi salah satu lembaga negara di atas lembaga negara lainnya, juga tidak lagi ada mandataris satu-satunya di negeri ini, atau dengan kata lain, tidak ada penanggung jawab tunggal atas kekurangan-kekurangan yang masih terjadi dan ditemui dalam kehidupan nasional kita. Semua lembaga negara masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan serta sekaligus porsi tanggung jawabnya sendiri meskipun saling berhubungan secara sinergis dalam konstruksi mekanisme *checks and balances*.

Dari uraian tersebut diatas, pertanyaan yang muncul adalah Konsep atau pendekatan pembangunan yang bagaimana yang tepat untuk masa kini dan masa depan bangsa? Karena persoalan feodalisme dan kolonialisme, yaitu musuhnya nasionalisme sudah tidak relevan lagi, tentu pemantapan kembali pondasi berbangsa dan bernegara harus ditunjukkan dengan wujud yang baru.

Memantapkan kembali pondasi berbangsa dan bernegara adalah **Menyegarkan kembali pandangan mengenai paham kebangsaan dan perannya dalam pembangunan masyarakat**, atau sekarang lebih dikenal dengan **memasyarakatkan kembali empat pilar utama bernegara**, yaitu **yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika**. Pandangan mengenai paham kebangsaan empat pilar bernegara baik untuk meningkatkan pemahaman kita akan sistem politik ketatanegaraan menurut UUD maupun sebagai dasar untuk pembangunan *nation and character building*. Karena itu, perlu dilakukan secara sistematis sebagai sebuah gerakan nasional.

Gerakan menyegarkan kembali paham kebangsaan kita yang bersumber pada empat pilar bernegara memiliki landasan spritual, moral dan etik. Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu membangun masyarakat masa kini dan masa depan untuk dunia dan akhirat.

Menyegarkan kembali paham kebangsaan tidak menempatkan bangsa kita diatas bangsa lain, tetapi menghargai harkat dan martabat kemanusiaan serta hak dan kewajiban asasi manusia yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan beradab.

Menyegarkan kembali paham kebangsaan adalah tidak pernah manapkan kemajemukan atau kebaragaman yang bersendikan persatuan dan kesatuan bangsa, ia berakar apada

asas kedaulatan yang berada ditangan rakyat. Oleh karena itu kebangsaan kita adalah paham demokrasi dan bertentangan dengan paham totaliter, ia memiliki cita-cita keadilan sosial dan menghendaki kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dengan gerakan Menyegarkan kembali paham kebangsaan, tidak hanya lagi dilihat sebagai wujud yang reaktif terhadap sesuatu keadaan atau ancaman, atau kekhawatiran terhadap "ini" atau terhadap "itu". Tetapi ia merupakan pandangan proaktif untuk membangun bangsa menuju perwujudan cita-citanya.

Inilah momentumnya bagi kita pemuda politisi anggota parlemen seluruh Indonesia, membulatkan tekad kebangsaan menuju Kebangkitan Indonesia Jilid II atau Reformasi jilid II. Kita harus optimis, sebab dalam pembangunan di berbagai bidang selama ini memberikan harapan kepada bangsa Indonesia bahwa upaya pembangunan yang telah ditempuh, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, menunjukkan keberhasilan, mengingat pemerintah sekarang memiliki semangat *pro-poor, pro-growth, pro-job, dan pro-environment*.

Dengan demikian, Membangun Rakyat dan Budaya Bernegara yang Mulia dan Bermartabat berbasis Pancasila, tidak lain adalah pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan konsepsi pembangunan yang paling mendasar.

Jakarta, 4 November 2010

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. Marzuki Alie